

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah bukan hanya pada rumah tinggal juga pada ruko pedagang, restoran makanan, hotel dan lainnya yang masuk dalam komersial non komersial. Pengelolaan sampah yang optimal merupakan suatu tantangan besar yang sekarang dihadapi hampir seluruh kota di Indonesia, khususnya Kota Bandung. Kota Bandung adalah ibu Kota Provinsi Jawa Barat sebagian aktifitas masyarakat berada di Kota Bandung dan Kota Bandung juga salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk yang banyak.

Peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi mengakibatkan jumlah timbulan sampah yang terus meningkat dimana peningkatan jumlah timbulan harus diikuti pengelolaan yang optimal sehingga masalah sampah tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dari sampah organik maupun non organik, apa lagi sampah yang ada dirumah makan maupun hotel-hotel yang ada di Kota Bandung dengan pembuangan sampah sementara seadanya tidak sesuai dengan sampah yang dibuang setiap harinya.

Aturan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan

atau/proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 (Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah) sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah Komersial non komersial. Sedangkan saat pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Dampak peningkatan aktivitas manusia, lebih lanjut mengakibatkan bertambahnya sampah.

Pengelolaan sampah Kota Bandung PD. Kebersihan melakukan berbagai inovasi antara lain dengan bank sampah, pengomposan, biodigester, biokonversi dengan maggot dan lain sebagainya agar sampah yang di buang di TPA berkurang. Hingga saat ini TPA yang digunakan adalah TPA Sarimukti yang berlokasi di Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dengan luas lahan \pm 25 Ha. Jarak tempuh dari Kota Bandung ke lokasi TPA \pm 45 km sehingga waktu tempuh angkutan per ritasi 3-4 jam. Sampah yang masuk ke TPA Sarimukti berasal dari Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. (<https://.serbabandung.com/pengelolaan-sampah-di-bandung/> diakses tanggal 28 April 2019, Jam 20.00 WIB)

Biaya yang diperlukan cukup besar mengingat kapasitas volume sampah yang besar dan biaya bahan bakar minyak (BBM). Salah satu cara yaitu dengan menaikan pendapatan perusahaan dari sektor penagihan. Upaya yang akan diberikan dalam penagihan piutang pada masyarakat dengan cara memberikan pemahaman yang baik dan mudah untuk dipahami oleh masyarakatnya karena

masyarakat masih ada yang belum paham dengan Perwal yang sudah ditetapkan yaitu Perwal Nomor 316 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Pada gambar dibawah dijelaskan dengan jelas infografis pengelolaan sampah sebagai berikut :

GAMBAR 1.1
Data Infografis Pengelolaan Sampah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung



Sumber: PD. (Perusahaan Daerah) Kebersihan Kota Bandung

Berdasarkan data infografis pengelolaan sampah diatas Kota Bandung mempunyai timbulan sampah setiap harinya sebanyak 1.600 ton/perhari setara

dengan 230 ekor gajah dewasa atau setara dengan 1 lapangan sepakbola dengan tinggi timbunan kurang lebih 1 meter, dengan sumber sampah 58% rumah tinggal dan 42% non rumah tinggal misalnya komersial non komersial atau juga kendaraan umum dan lainnya.

Dalam permasalahan yang ada penulis menyoroti satu masalah tentang tarif jasa pengelolaan sampah khususnya kategori komersial Non komersial. Sesuai dengan PERWAL (PERATURAN WALIKOTA) BANDUNG NO 316 TAHUN 2013 Tentang Pengolaan Sampah dalam Pasal 5 Golongan wajib bayar jasa pengelolaan sampah :

- a. Rumah tinggal
- b. Komersial/non komersial
- c. Sosial
- d. Pedagang sektor informal;dan
- e. Angkutan umum

Adapun penulis mengambil satu kategori yaitu komersial non komersial, golongan wajib bayar komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi : hotel, restoran, supermarket / mall / pasar swalayan, industri/ pabrik, pelayanan pendidikan swasta, pelayanan kesehatan swasta dan lain-lain. Sedangkan non komersial meliputi : pelayanan pendidikan Pemerintah, pelayanan kesehatan Pemerintah, kantor Pemerintah. Maka dari itu data piutang yang di dapat dari PD. Kebersihan Kota Bandung untuk kategori komersial non komersial sangatlah banyak dan meningkat dari tahun ketahunya karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pasar swalayan, mall, hotel, rumah sakit, ruko-ruko dan lainnya.

Dengan kemajuannya Kota Bandung penduduk dikota Bandung semakin meningkat \pm 2-3 juta jiwa ditambah dengan adanya pendatang dari luar kota, dikarenakan masyarakat ingin mengadu nasib datang ke Ibu Kota Jawa Barat yaitu Kota Bandung dengan adanya komuter/urban rata-rata setiap orang membuang 0,6 sampah/hari.

Adapun tarif jasa pengelolaan sampah sesuai dengan Perwal 316 Tahun 2013 dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 1.2

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Golongan Komersial Nonkomersial

No	Jenis Usaha	Indeks			Tarif Rp. / M3	Penetapan Tarif
		Besar (1,30)	Sedang/Menengah (1,20)	kecil (1,00)		
1	Golongan Komersial : Hotel/Losmen/Penginapan	Berbintang lebih dari 3	Berbintang 1 sampai dengan 3	Melati dan sejenisnya	60,000	Tarif per M3 x jumlah volume sampah x indeks
2	Golongan Komersial Usaha Lainnya	Terletak di jalan arteri primer dan sekunder atau luas bangunan lebih dari 500 M2	Terletak di jalan kolektor primer dan sekunder atau luas bangunan 401 sampai dengan 500 M2	Terletak di jalan lokal dan lingkungan atau luas bangunan kurang dari atau sama dengan 400 M2	60,000	Tarif per M3 x jumlah volume sampah x indeks
3	Golongan Non Komersial	Terletak di jalan arteri primer dan sekunder atau luas bangunan lebih dari 500 M2	Terletak di jalan kolektor primer dan sekunder atau luas bangunan 401 sampai dengan 500 M2	Terletak di jalan lokal dan lingkungan atau luas bangunan kurang dari atau sama dengan 400 M2	60,000	Tarif per M3 x jumlah volume sampah x indeks

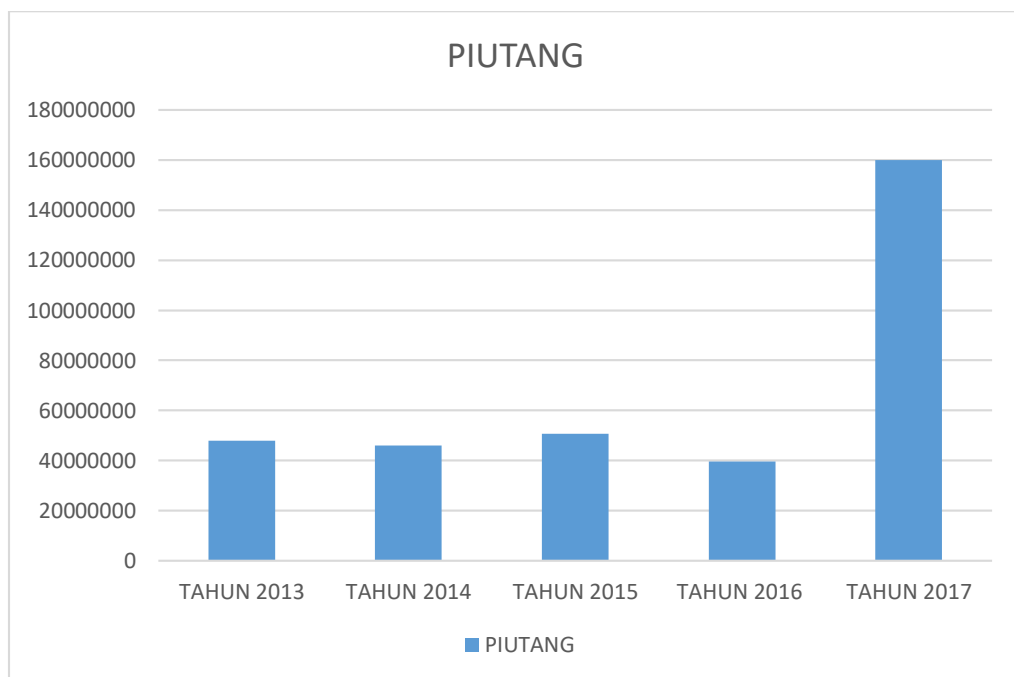
Sumber: Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah

Namun dalam hal ini peneliti akan menyoroti masalah piutang dalam tarif jasa pengelolaan sampah kategori komersial non komersial karena urutan kedua yang mendominasi dalam pembuangan sampah terbesar setelah kategori rumah tinggal, dan peneliti mengambil Wilayah Bandung Timur sebagai studi kasus permasalahan piutang pada PD. Kebersihan Kota Bandung. Dikarenakan piutang adalah aset lancar dari perusahaan yang harus di bayarkan dari pelanggannya yang mendapatkan jasa oleh karena itu, piutang menjadi masalah besar pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung karena banyaknya masyarakat yang kurang patuh dengan PERWAL Nomor 316 tahun 2013 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintahan sehingga terjadinya piutang dari tahun ke tahun, dan juga masyarakat atau yang masuk kategori komersial non komersial mengandalkan orang ketiga untuk membayar jasa pengangkutan sampahnya dan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang diterima oleh PD. Kebersihan dan ada juga yang membayar dengan setengah harga yang sudah ditetapkan. Maka dari itu perusahaan daerah kebersihan kota bandung mengalami piutang yang meningkat setiap tahun dan mengakibatkan pendapatan dari perusahaan berkurang.

Pada Data laporan piutang PD. Kebersihan Kota Bandung tahun 2013-2017 Wilayah Bandung Timur, mengalami peningkatan khususnya kategori komersial masyarakat berhutang kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung setiap tahunnya adanya peningkatan piutang dari tahun 2013 sampai 2017 mengakibatkan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung mengalami penurunan pendapatan dan mempengaruhi aset lancar dari Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dan PD Kebersihan Adalah satu satunya perusahaan kebersihan Kota Bandung

yang memeberikan pelayanan jasa kebersihan dan membantu pendapatan daerah semakin baik maka dari itu peneliti mengambil permasalahan tentang piutang pada PD. Kebersihan dan menyajikan data dengan rincian data sebagai berikut :

GAMBAR 1.3
GRAFIK DATA PIUTANG TARIF JASA PENGELOLAAN SAMPAH
KATEGORI KOMERSIAL WILAYAH BANDUNG TIMUR



Sumber: Laporan Keuangan PD, (Perusahaan Daerah) Kebersihan Kota Bandung Tahun 2013-2017

Keterangan :

2013 Piutang sebesar Rp. 47.783.500
 2014 Piiutang sebesar Rp. 45.952.000
 2015 Piutang sebesar Rp. 50.570.000
 2016 Piutang sebesar Rp. 39.653.100
 2017 Piutang sebesar Rp. 160.143.000

Kategori non komersial juga terdapat peningkatan piutang tarif jasa dari tahun 2013-2014 dengan adanya peningkatan data piutang tarif jasa maka setiap tahunnya Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung mengalami penurunan pendapatan dari jasa yang sudah diberikan, tidak menutup kemungkinan lambat lahun perusahaan akan mengalami kerugian yang besar maka dari itu peneliti mengambi permasalahan dari piutang tersebut dan peneliti menyajikan data dengan rincian data sebagai berikut :

GAMBAR 1.4
GRAFIK DATA PIUTANG TARIF JASA PENGELOLAAN SAMPAH
KATEGORI NON KOMERSIAL WILAYAH BANDUNG TIMUR



**Sumber: Laporan Keuangan PD. (Perusahaan Daerah) Kebersihan
Kota Bandung Tahun 2013-2017**

Keterangan :

2013 Piutang sebesar Rp. 7.699.000

2014 Piutang sebesar Rp. 7.750.000

2015 Piutang sebesar Rp. 11.010.000

2016 Piutang sebesar Rp. 20.470.000

2017 Piutang sebesar Rp. 57.430.000

Dilihat dari masalah tersebut, PD. Kebersihan mengalami permasalahan keuangan yang menyangkut aset lancar (piutang) dalam pengelolaan sampah kategori Komersial Non Komersial, jelas hal ini sangat merugikan karena PD. Kebersihan sendiri tidak bisa melakukan tindakan apapun, sebagai contoh jika PD. Kebersihan mencabut izin seperti tidak mengangkut sampah untuk kategori Komersial Non Komersial tidak akan membuat masyarakat sadar namun akan muncul permasalahan baru, Hotel dan rumah makan rumah makan akan membuang sampah sembarangan bahkan bisa saja ke sungai dan ataupun membakarnya sembarangan.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan menganalisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan konsep analisis piutang, dan sesuai dengan fenomena yang diharapkan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Analisis Piutang Tarif Jasa dalam Pengelolaan Sampah Kategori Komersial Non Komersial pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung (Studi Kasus Wilayah Bandung Timur)”

B. Fokus Masalah

Perusahaan Daerah Kebersihan sebagai perusahaan yang ditangani oleh pemerintah daerah dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun

berbagai kendala yang datang harus dapat ditangani oleh PD. Kebersihan, sehingga untuk membantu memecahkan permasalahan ini, penulis perlu mengetahui beberapa hal yang penulis belum ketahui. Penelitian ini berusaha memahami beberapa aspek mengenai kinerja keuangan, pada hal ini dibatasi pada kinerja keuangan PD. Kebersihan Kota Bandung.

Beberapa pernyataan utama yang akan dicoba dijawab melalui penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara perusahaan untuk mengumpulkan/menagih piutang ?
2. Bagaimana cara perusahaan mengelola piutang khusus kategori Komersial Non Komersial dalam pengelolaan sampah?

C. Rumusan Masalah

Bagaimana analisis piutang tarif jasa dalam pengelolaan sampah kategori komersial non komersial pada PD. Kebersihan Kota Bandung di Wilayah Bandung Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis piutang tarif jasa dalam pengelolaan sampah kategori komersial non komersial pada PD. Kebersihan Kota Bandung di Wilayah Bandung Timur.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan teori dan untuk kepentingan penelitian dimasa akan datang dan bisa menjadi acuan atau pedoman untuk peneliti yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai piutang di perusahaan. Serta penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP).

b. Bagi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

Sebagai bahan saran dan pertimbangan dalam memperbaiki kinerja keuangan khususnya piutang kategori komersial non komersial dapat mendapatkan solusi untuk menyelesaikannya.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa program studi Administrasi Publik pada khususnya dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada umumnya.

F. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 (Tentang Pengelolaan Sampah) yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau/proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 (Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah) sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah Komersial non komersial. Sedangkan saat pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Dampak peningkatan aktivitas manusia, lebih lanjut mengakibatkan bertambahnya sampah.

Dalam permasalahan yang ada penulis menyoroati satu masalah tentang tarif jasa pengelolaan sampah khususnya kategori komersial non komersial. Sesuai dengan PERWAL (PERATURAN WALIKOTA) BANDUNG NO 316 TAHUN 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 5 Golongan wajib bayar jasa pengelolaan sampah :

1. Rumah tinggal
2. Komersial/non komersial
3. Sosial
4. Pedagang sektor informal;dan
5. Angkutan umum

Katagori yang peneliti ambil yaitu komersial non komersial peneliti mendapatkan masalah yaitu tentang piutang tarif jasa yang setiap tahun nya

mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan adanya masalah tersebut Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung mengalami penurunan pendapatannya sehingga mempengaruhi aset lancar dari perusahaan tersebut.

Penelitian ini teori inti yang digunakan terbagi ke tiga bagian (Grand Theory, Middle Theory, dan Operational Theory), diantaranya:

1. Administrasi Publik (*Grand Theory*)

Sondang P. Siagian (2014:2) mengatakan bahwa :

“Administrasi negara (administrasi publik) dalam pelaksanaan kegiatannya bermotifkan pemberian *service* yang seefisien, seekonomis, dan seefektif mungkin kepada setiap warga negara yang harus dilayaninya. Pemberian *service* yang efisien, ekonomis, dan efektif itu merupakan *conditio sine quanon* (syarat) administrasi, karena seperti telah dikatakan tujuan yang hendak dicapai oleh negara tidak terbatas, sedangkan alat-alat pemuasnya selalu terbatas. Karenanya, *input* (sumber-sumber) yang dipergunakan harus diusahakan.”

Administrasi publik tentu saja fokus terhadap kebijakan lembaga-lembaga pemerintah dan program-program dari setiap lembaga pemerintah. Program tersebut biasanya sebagai respon pemerintah terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan publik kepada rakyatnya sehingga administrasi publik itu bagian eksekutif dari suatu pemerintahan dan tetap berhubungan dengan badan legislatif dan yudikatif dalam kenyataannya untuk memberikan suatu pelayanan publik yang efisien dan efektif.

Frank J. Goodnow mengutip Irfan Islamy (2014:40) mengatakan bahwa :

“Administrasi Negara (publik) yang pertama ini menekankan pada “*locus*” administrasi negara yang dipusatkan pada birokrasi pemerintahan (*the government’s bureaucracy*), sedangkan lembaga legislatif dan yudikatif tetap mempunyai fungsi dan tanggungjawab merumuskan tentang apa yang menjadi keinginan negara, sehingga keduanya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari administrasi negara.”

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu dalam Pelaksana kegiatan di dalam Administrasi publik tentunya para aparatur pemerintah yang berada dalam tatanan birokrasi pemerintahan karena para aparatur pemerintah tersebut berkewajiban memberikan pelayanan publik untuk melayani seluruh warga negara yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyatnya.

2. Keuangan Negara (*Middle Theory*)

Menurut Sahya Anggara mengatakan Mengatakan Keuangan Negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi barang yang dimiliki; kertas berharga yang bernilai uang; dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki/ dan atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan, maupun institusi lain.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam bukunya Sutedi yaitu Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 yat (1) perumusan Keuangan Negara menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. Dari sisi Objek, keuangan negara akan meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, didalamnya termasuk berbagai kebijakan dan kegiatan yang terselenggara dalam bidang fiskal, moneter dan atau pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu segala sesuatu

dapat berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2. Dari sisi subjek, keuangan negara meliputi negara, dan/atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
3. Keuangan negara dari sisi proses mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung- jawaban.
4. Keuangan negara dari sisi tujuan, keuangan negara juga meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Arifin P. Soeria Atmadja 2009:2-3 mengatakan bahwa :

“Keuangan negara bersifat plastis, tergantung kepada sudut pandang sehingga apabila berbicara keuangan negara dari sudut pemerintah, yaitu keuangan negara disebut APBN. Sementara itu, apabila bicara keuangan Negara dari sudut pemerintah daerah, yang dimaksud keuangan Negara adalah APBD, demikian seterusnya dengan Perjan, PN-PN maupun perum. Dengan perkataan lain keuangan Negara dalam arti luas meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keuangan Negara pada Perjan, Perum, dan sebagainya, sedangkan definisi dalam arti sempit adalah hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya”.

Berdasarkan penjelasan yang ada di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Keuangan Negara adalah segala hak dan kewajiban negara yang berkaitan dengan kertas berharga yang bernilai uang maupun barang, dan pada obyek

keuangan negara dimulai dari perumusan, penetapan, penyusunan sampai pertanggungjawaban atas hak dan kewajiban tersebut.

5. Analisis Piutang

Hery 2012:132 mengatakan bahwa :

“Analisis posisi keuangan terkini dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar, yang tercermin dalam pengukuran seperti rasio lancar, juga harus mengakui pentingnya siklus operasi normal bisnis perusahaan untuk mengklasifikasi piutang dalam kategori lancar. Hal lainnya, deskripsi piutang pada catatan laporan keuangan biasanya tidak cukup untuk memberikan tingkat kehandalan mengenai saldo piutang. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kehandalan piutang adalah menyangkut kebijakan kredit. Kebijakan kredit yang ketat dapat berdampak bagi peningkatan kualitas informasi piutang dan mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang.”

Menanggapi pernyataan tersebut bahwasanya Piutang merupakan aset lancar dari sebuah perusahaan yang harus di bayarkan oleh konsumen yang mendapatkan jasa dari perusahaan tersebut karena mempengaruhi pendapatan dari perusahaan yang memeberikan jasa atau pelayanan.

Secara teoritis, K.R Subramanyam (2014:251) mengartikan Analisi Piutang yaitu terdapat Risiko Kolektabilitas (Ketertagihan) mencakup :

1. Memeriksa konsentrasi pelanggan-resiko meningkat jika piutang terkonsentrasi pada satu atau sedikit pelanggan.

Piutang seharusnya tidak terkonsentrasi kepada satu pelanggan sehingga tingkat ketertagihan piutang ini risikonya kecil dapat tertagih jika hanya terkonsentrasi pada satu pelanggan, akan tetapi piutang harus difokuskan kepada semua pelanggan dikarenakan perusahaan jasa dan jasa yang perusahaan berikan semua masyarakat menikmati dampaknya, oleh karena itu resiko ketertagihan

piutang akan besar dapat tertagih jika semua pelanggan difokuskan dalam ketertagihannya.

2. Menentukan bagian piutang yang merupakan pengalihan atau perpanjangan (*renewal*) dari piutang atau wesel tagih masa lalu.

Dalam penentuan piutang pengalihan/perpanjangan sesuai dengan waktu estimasi piutang tak tertagih setiap satu tahun sekali piutang di perpanjang dan setiap tiga tahun piutang akan dihapuskan sesuai dengan syarat yang berlaku di perusahaan tersebut jika estimasi piutang tak tertagih benar-benar terjadi.

Gambar 1.5

Kerangka Pemikiran Penelitian

Peraturan Walikota
Bandung No. 316 2013
Tentang Tarif Jasa
Pengelolaan Sampah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Analisis Piutang (K.R Subramanyam)
Dimensi-Dimensinya :

1. Membandingkan piutang pesaing sebagai persentase penjualan dengan piutang perusahaan yang sedang dianalisis.
2. Memeriksa pemusatan pelanggan-risiko meningkat jika piutang terpusat pada satu atau sedikit pelanggan.
3. Menghitung dan memeriksa Trend (kecenderungan) rata-rata periode penagihan piutang yang dibandingkan dengan jangka waktu kredit umum untuk industri tersebut.

4. Menentukan bagian piutang yang merupakan perpanjangan piutang atau wesel tagih sebelumnya.

Sumber : K.R. Subramanyam (2014:251)

Penelitian dilakukan Tahun 2018

G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian yang sudah di jelaskan dihalaman sebelumnya, maka proposisi dari penelitian ini adalah Analisis Piutang tarif jasa pengelolaan sampah kategori komersial non komersial pada perusahaan daerah kebersihan Kota Bandung dengan menggunakan Peraturan Wali Kota Bandung No.316 Tahun 2013 dan di perkuat oleh teori dari K.R Subramanyam Tentang Analisis Piutang yang memiliki satu indikator yaitu Risiko penagihan, Resiko penagihan Adalah penyisihan piutang yang tak tertagih berdasarkan pada masa lalu dengan melakukan penyisihan baik dalam kondisi ekonomi, industri, debitur pada masa sekarang.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG